

UPAYA ADMINISTRATIF DAN UPAYA HUKUM PERPAJAKAN YANG BERKEADILAN

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Anggota P5i

Seminar Nasional Perpajakan

Diselenggarakan oleh Perkumpulan Profesi Pengacara Dan Praktisi Pajak Indonesia (P5i)

Jakarta, P5i 6 September 2024

Pajak

➡ Apa...?

⇒ Kontribusi Wajib
kpd negara

➡ Bagaimana...? ⇒ Berdasarkan UU

➡ Untuk Apa...? ⇒ Tulang Punggung
Anggaran

Peran Pajak

APBN 2024



**Pajak
Rp. 2.309,9 T**

Pendapatan Negara

Rp2.802,3 T

Tumbuh 6,3% dari *Outlook* 2023 terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan

- **Perpajakan** Rp2.309,9 T
- **PNBP** Rp492,0 T
- **Hibah** Rp0,4 T

Belanja Negara

Rp3.325,1 T

Tumbuh 6,4% dari *Outlook* 2023 dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas nasional

- **Belanja Pemerintah Pusat** Rp2.467,5 T
- **Transfer Ke Daerah** Rp857,6 T

Pembiayaan Anggaran

Rp522,8 T

antara lain :

- **Pembiayaan Utang** Rp648,1 T
- **Pembiayaan Investasi** Rp(176,2) T

Total Pajak 82,5% dari total pendapatan APBN 2024

Dilema Pajak

Hak Negara:

- Menetapkan pajak dengan UU
- Menetapkan wajib pajak
- Menetapkan utang pajak
- Memungut pajak
- Menagih dengan surat paksa
- Merampas kekayaan wajib pajak
- Menyandra wajib pajak

Beban Rakyat:

- ❑ Kontribusi wajib yang tidak bisa dihindari
- ❑ Hutang yang harus dibayar
- ❑ Ditagih secara paksa
- ❑ Kekayaan dirampas
- ❑ Wajib pajak disandra
- ❑ Tidak mendapat kontraprestasi langsung



Sengketa Pajak



Fiscus



WP / PP

Akibat Administrasi Perpajakan:

- Surat Ketetapan Pajak
- Surat Ketetapan Pajak Terhutang
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- Penagihan dengan Surat Paksa
- dll

Apakah karena kesalahan Fiscus atau WP/PP



Keadilan pajak?

Sengketa Pajak

Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2019-2023

Jumlah Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat 2019-2023

No	Terbanding/Tergugat	Tahun					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dirjen Pajak	12.882	14.660	12.317	11.602	10.038	61.499
2	Dirjen Bea dan Cukai	2.142	1.830	2.804	2.889	2.615	12.280
3	Pemda	24	144	67	218	61	514
	Total	15.048	16.634	15.188	14.709	12.714	74.293

*Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak, diunduh 4 Sept. 2024

Sengketa Pajak

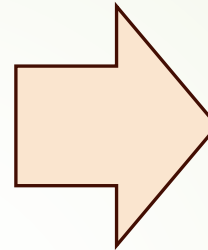
Penyelesaian sengketa pajak tahun 2019 - 2023

Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019-2023							
No	Hasil Putusan	Tahun					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pencabutan dan Penetapan	240	141	232	507	339	1.459
2	Tidak Dapat Diterima	621	573	1.381	959	1174	4.708
3	Menolak	2.388	2.507	3.297	4.634	4.574	17.400
4	Menambah Pajak yang Harus Dibayar	1	6	9	1	2	19
5	Mengabulkan Sebagian	1.903	2.282	2.590	3.004	2.769	12.548
6	Mengabulkan Seluruhnya	4.937	4.598	5.338	6.374	7.399	28.646
7	Membatalkan	76	21	112	82	21	312
	Total	10.166	10.128	12.959	15.561	16.278	65.092

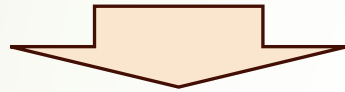
*Suber: Sekretariat Pengadilan Pajak, diunduh 4 Sept. 2024

Penyelesaian Sengketa Pajak

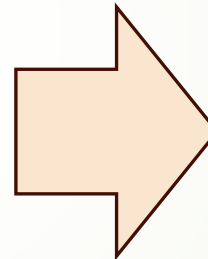
➤ **Upaya Keberatan**
(Upaya Administratif)



Dirjen Pajak
atau Pemda

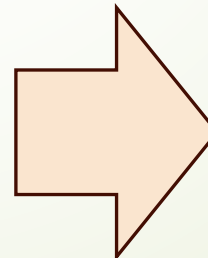


➤ **Upaya Banding**
(Upaya Litigasi)



Pengadilan Pajak

➤ **Upaya Gugat**
(Upaya Litigasi)



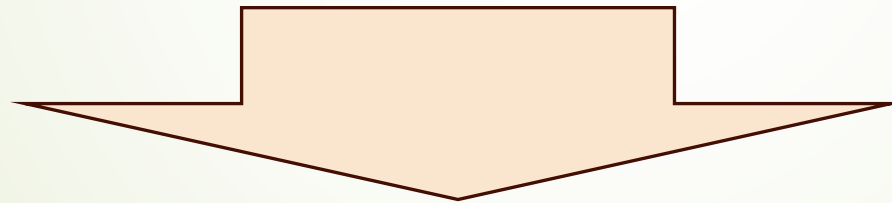
Pengadilan Pajak

**PK
MA**

Penyelesaian sengketa pajak yang adil.....?

Pajak Berkeadilan

- Dilakukan : Sesuai hukum yang berlaku
- Subyek pajak : Jujur
- Objek pajak : Objektif
- Fiskus : Bersih dan bebas dari KKN
- Administrasi Pajak: Benar dan akurat



**Pajak digunakan sebesar-besarnya
untuk kesejahteraan rakyat**

Demikian



Thank You

